

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014).

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013). Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Hapsari, 2008). Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, 2009).

Banyaknya kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi pukulan telak bagi pemerintah itu sendiri yang menjadikan pembaharuan terhadap sistem akuntansi pemerintah menjadi tak berarti ketika faktor-faktor yang lain tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Bagi Pemerintah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu

opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit keuangan pemerintah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I tahun 2018, BPK mengungkapkan 33 dari 34 pemerintah provinsi mendapatkan opini WTP sedangkan 298 dari 415 pemkab mendapatkan opini WTP dan 80 dari 93 pemkot meraih opini WTP. (IHPS Semester I 2018)

Berikut ini opini LKPD Tahun 2013-2017 Berdasarkan tingkat Pemerintah Daerah :

Tabel 1.1

Opini LKPD Tahun 2013-2017 berdasarkan tingkat Pemerintah Daerah

Tahun	Provinsi									Kabupaten									Kota								
	WTP	Jumlah	WDP	Jumlah	TMP	Jumlah	TW	Jumlah	Total	WTP	Jumlah	WDP	Jumlah	TMP	Jumlah	TW	Jumlah	Total	WTP	Jumlah	WDP	Jumlah	TMP	Jumlah	TW	Jumlah	Total
2013	48%	16	45%	15	7%	2	0%	0	33	26%	105	61%	241	10%	41	3%	11	398	38%	35	59%	55	3%	3	0%	0	93
2014	76%	26	21%	7	3%	1	0%	0	34	44%	169	50%	188	5%	18	1%	4	379	62%	56	38%	35	0%	0	0%	0	91
2015	85%	29	15%	5	0%	0	0%	0	34	55%	224	37%	151	7%	29	1%	4	408	66%	60	33%	30	1%	1	0%	0	91
2016	91%	31	9%	3	0%	0	0%	0	34	66%	274	29%	120	5%	21	0%	0	415	77%	72	22%	20	1%	1	0%	0	93
2017	97%	33	3%	1	0%	0	0%	0	34	72%	298	24%	100	4%	17	0%	0	415	86%	80	14%	13	0%	0	0%	0	93

Sumber : (www.bpk.go.id) IHPS 1 tahun 2017 dan IHPS 1 tahun 2018

Dalam tabel tersebut kualitas LKPD tahun 2017 untuk tingkat provinsi yang mendapatkan opini WTP sebesar 97% atau 33 dari 34 provinsi sedangkan untuk tingkat kabupaten pada tahun 2017 sebesar 72% atau 298 dari 415 kabupaten dan untuk tingkat kota pada tahun 2017 yang mendapatkan opini WTP sebesar 86% atau 80 dari 93 kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan. Itu artinya pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

Akan tetapi masih banyak LKPD yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dari 542 LKPD tahun 2017 yang diperiksa oleh BPK, sebanyak 131 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 113 mendapatkan opini WDP dan 18 yang mendapatkan TMP. LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Salah satu contohnya adalah pada akun aset tetap dan aset lainnya. Permasalahan penyajian aset tetap terjadi pada 109 pemda antara lain:

1. Pencatatan aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap yang bersumber dari dana BOS belum dilakukan atau tidak akurat, antara lain terjadi pada
2. Pencatatan aset tetap dilakukan secara gabungan dan tidak terperinci per aset, dan penambahan nilai aset tetap setelah perolehan tidak diatribusi/dikapitalisasi ke aset induk, antara lain Pemkab Langkat, Pemkot Tegal, Pemkab Karo, Pemkab Belitung, Pemkab Nias Utara, Pemkot

Gunung Sitoli, Pemkab Bolaangmongondow, Pemkab Nduga, dan Pemkab Tolikara.

3. Aset tetap yang dialihkan pemprov masih dicatat sebagai aset pemda dan disusutkan pada Pemkab Banggai Kepulauan dan Pemkab Rote Ndao. (IHPS I BPK RI tahun 2018)
4. Aset lainnya tidak di amortisasi dan disusutkan karena pemda belum memiliki kebijakan akuntansi, antara lain terkait dengan masa manfaat, metode amortisasi aset tak berwujud, dan penyusutan aset lainnya pada Pemkab Labuhanbatu.
5. Mutasi kurang atas aset lainnya tidak dapat dijelaskan, dan penyajian saldo aset lainnya tidak melalui inventarisasi menyeluruh dan lengkap pada Pemkab Seram Bagian Barat.
6. Aset lainnya berupa sisa kas yang belum disetor atau kekurangan kas, belum dilakukan rekonsiliasi, dipertanggungjawabkan, dan ditetapkan pembebanan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) antara lain terjadi pada Pemkab Flores Timur, Pemkab Deiyai, Pemkab Dogiyai.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar akuntansi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. (Mahmudi, 2010 : 22-23)

Berikut ini opini LKPD tahun 2013-2017 berdasarkan tingkat Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat :

Tabel 1.2
Opini LKPD tahun 2013-2017 berdasarkan tingkat Pemerintah Daerah
di Provinsi Jawa Barat

No	Entitas Pemerintah Daerah	TAHUN																			
		2013				2014				2015				2016				2017			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
1	Prov. Jawa Barat	✓				✓				✓				✓				✓			
2	Kab. Bandung			✓			✓				✓			✓					✓		
3	Kab. Bandung Barat		✓				✓				✓				✓					✓	
4	Kab. Bekasi		✓				✓			✓				✓					✓		
5	Kab. Bogor		✓				✓			✓				✓					✓		
6	Kab. Ciamis	✓					✓			✓				✓					✓		
7	Kab. Cianjur		✓				✓			✓				✓					✓		
8	Kab. Cirebon		✓				✓			✓				✓					✓		
9	Kab. Garut		✓				✓			✓				✓					✓		
10	Kab. Indramayu			✓			✓			✓				✓					✓		
11	Kab. Karawang		✓				✓			✓				✓					✓		
12	Kab. Kuningan		✓				✓			✓				✓					✓		
13	Kab. Majalengka	✓					✓			✓				✓					✓		
14	Kab. Pangandaran						✓				✓			✓					✓		
15	Kab. Purwakarta		✓				✓			✓				✓					✓		
16	Kab. Subang		✓					✓				✓			✓					✓	
17	Kab. Sukabumi		✓				✓			✓				✓					✓		
18	Kab. Sumedang		✓				✓			✓				✓					✓		
19	Kab. Tasikmalaya		✓				✓			✓				✓					✓		
20	Kota Bandung		✓					✓			✓				✓					✓	
21	Kota Banjar	✓					✓			✓				✓					✓		
22	Kota Bekasi		✓					✓		✓				✓					✓		
23	Kota Bogor		✓					✓			✓			✓					✓		
24	Kota Cimahi	✓					✓			✓				✓					✓		
25	Kota Cirebon		✓					✓			✓			✓					✓		
26	Kota Depok	✓					✓			✓				✓					✓		
27	Kota Sukabumi		✓				✓			✓				✓					✓		
28	Kota Tasikmalaya		✓					✓			✓			✓					✓		

Sumber : (www.bpk.go.id) IHPS 1 tahun 2018

Dalam tabel di atas kualitas LKPD tahun 2017 untuk tingkat pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP sebesar 88% untuk tingkat kabupaten/kota. Jika dilihat dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di daerah Jawa Barat telah mengelola keuangan daerahnya dengan baik sesuai standar yang berlaku. Tetapi masih ada catatan yang diberikan kepada masing-masing kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Terlepas dari itu masih ada Pemda yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yaitu Pemkab Bandung dan Pemkab Indramayu pada tahun 2013 dan tidak sedikit Pemkab atau Pemkot yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam beberapa tahun kebelakang.

Salah satu contohnya yaitu pada Kabupaten Bandung Barat yang mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Masalah ini bermula pada Badan Pemeriksa Keuangan menemukan masih banyak lahan fiktif di Kabupaten Bandung Barat. BPK telah mengkonfirmasi ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bandung Barat. DPPKAD mencatat ada sebanyak 17.400 m² lahan fiktif dan berada di desa Cilame karena adanya pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung ke KBB sejak 2010. Kepala Bidang Aset pada DPKAD Kabupaten Bandung Barat, Asep Sudiro (2019) mengatakan penyelesaian permasalahan ini pihaknya terus lakukan koordinasi dengan Kabupaten Bandung agar merevisi penyerahan aset tersebut supaya cepat selesai. “ini akan berdampak pada

opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Jadi kami akan kejar terus untuk selesai.” Katanya di Ngamprah, Selasa (12/02/2019).

Bupati Bandung Barat Aa Umbara (2019) Sutisna mengatakan, pemerintah daerah harus serius dalam menyelesaikan berbagai masalah aset. Hal ini dilakukan untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Kami sudah bentuk panitia khusus untuk menangani soal aset ini. Dan kami juga terus berkonsultasi dengan BPK agar masalah ini bisa selesai.” Ujar Umbara di Ngamprah, Kamis 21 Maret 2019. Menurut dia, meraih opini WTP dari BPK RI tahun ini merupakan target wajib kepemimpinan pasangan Aa Umbara dan Hengki Kurniawan. Untuk itu, dia meminta agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa memaksimalkan kinerja untuk mencapai target tersebut. “Saya harapkan semua SKPD bisa betul-betul mengejar target yang jelas. Walaupun tahun ini bukan tahun anggaran pasangan AKUR, bagaimana pun ini kepemimpinan AKUR yang wajib mendapat WTP”. Ujarnya.

Seperti diketahui, sejak berdiri 11 tahun yang lalu, Pemkab Bandung Barat belum pernah meraih WTP untuk laporan keuangan pemerintah daerah. Pada beberapa tahun terakhir, Pemkab Bandung Barat harus puas dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Pemkab Bandung Barat sendiri masih memiliki sebagian ribuan aset yang belum memiliki sertifikat. Data BPKD kabupaten Bandung Barat dari 1.444 bidang , baru 26 bidang yang sudah memiliki sertifikat pada tahun 2017.

Data berikut ini merupakan opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung barat selama 5 tahun :

Tabel 1.3

Daftar opini BPK untuk LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

No	Tahun	Opini
1	2013	Wajar Dengan Pengecualian
2	2014	Wajar Dengan Pengecualian
3	2015	Wajar Dengan Pengecualian
4	2016	Wajar Dengan Pengecualian
5	2017	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber : (www.bpk.go.id) IHPS Semester I tahun 2018

Ikatan Akuntan Indonesia menilai kualitas laporan keuangan Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, terutama korupsi di sejumlah pemerintah daerah. IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas laporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hamper sebagian besar pemerintah Indonesia di Kabupaten/Kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi kepada public semakin kuat dengan pelaporan keuangan, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan.

SAP merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Udiyanti, dkk, 2014). Apabila dikaitkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, apabila entitas pelaporan belum dapat sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan menyebabkan pada menurunnya kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan kemampuan untuk dipahami oleh para pengguna.

Untuk dapat menyediakan informasi keuangan secara tepat dan akurat komponen yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Sehingga untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Komponen yang sangat perlu untuk dikenali dan dipahami untuk mendukung kualitas laporan keuangan daerah meliputi

faktor-faktor seperti pemanfaatan teknologi informasi antara lain perangkat keras dan perangkat lunak. (Halim:2012).

Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh pengguna teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga kualitas laporan keuangan juga dapat meningkat (Widjajanto 2001 dalam Sembiring 2013).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. (Tata Sutabri 2012 : 3)

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tepat waktu dan andal, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Berry Wan Saputra (2015) dan Dicki Rahman (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Berry Wan Saputra (2015) yang berjudul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada SKPD Kota Pekanbaru) yang membedakan penulis dan peneliti sebelumnya yaitu perbedaan jumlah variabel independen yang di gunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel independen sedangkan penulis hanya menggunakan dua variabel independen. Peneliti sebelumnya mengambil sampel sebanyak 44 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian Dicki Rahman (2015) yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey pada SKPD Provinsi Riau). Dalam penelitian tersebut variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan 49,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu variabel yang digunakan penulis tidak menggunakan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian

Intern dan penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Akuntansi Pemerintah dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).**

1.2 Identifikasi Masalah dan dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*).
2. Masih banyak LKPD yang belum mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) bahkan masih ada LKPD yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
3. Selama berdiri Kabupaten Bandung Barat tidak pernah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

2. Bagi Instansi

Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini sekitar bulan Mei 2019 sampai dengan selesai.